



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 Nomor 44) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan sesuai perintah Pejabat yang Berwenang dan tertuang dalam SPT dan SPD dengan menggunakan tanda tangan elektronik atau manual.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
  - a. Bupati atau Wakil Bupati untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Bupati atau Wakil Bupati;
  - b. Pimpinan dan anggota DPRD diatur tersendiri oleh DPRD sesuai dengan tata tertib DPRD;
  - c. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati;
  - d. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Asisten, Kepala SKPD, Pejabat eselon III pada lingkungan Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan SPT dapat ditandatangani oleh Asisten yang membidangi;
  - e. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pejabat eselon IV, ASN, calon pegawai negeri sipil, Non ASN dan Pihak Lain pada masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah;
  - f. Kepala SKPD untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh ASN, calon pegawai negeri sipil, Non ASN dan Pihak Lain pada SKPD di lingkungannya;

g. Kepala ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

- g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada satu kota dengan Perangkat Daerah induk ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Induk sedangkan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada tidak satu kota dengan Perangkat Daerah Induk, maka SPT ditandatangani oleh kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah atas nama Kepala Perangkat Daerah Induk; dan
  - h. Tenaga Ahli DPRD ditandatangani oleh sekretaris DPRD berdasarkan rekomendasi ketua fraksi/ketua panitia khusus.
- (3) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan:
- a. pelaksana tugas;
  - b. waktu pelaksanaan tugas;
  - c. tempat pelaksanaan tugas;
  - d. maksud pelaksanaan tugas; dan
  - e. pemberi tugas.
- (4) Dalam hal Pejabat yang berwenang menandatangani SPT tdk ada/cuti, dapat ditandatangani oleh Pejabat yang diberi pelimpahan jabatan tersebut (Plh/Plt).
- (5) Format SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Di antara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 37 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (7a) dan ayat (7b) sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dibayarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan:
- a. dalam Daerah yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
  - b. melewati batas Daerah.

(2) Uang ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, ASN, Pegawai Non ASN, dan Pihak Lain dalam menjalankan perintah Perjalanan Dinas dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam.
- (3) Penggantian biaya keperluan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi keperluan:
  - a. uang saku;
  - b. transportasi lokal; dan
  - c. uang makan.
- (4) Perjalanan Dinas di dalam daerah kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
- (5) Pembayaran uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara Lumpsum sesuai dengan jumlah Hari riil pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan mengacu pada jumlah Hari yang tercantum dalam SPT.
- (6) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam rangka mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi dari 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota diberikan uang harian pendidikan dan pelatihan.
- (7) Penugasan Perjalanan Dinas dalam daerah yang dilaksanakan lebih dari satu tujuan dan merupakan satu kesatuan penugasan dan/atau waktu pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam diberikan sebesar 1 (satu) kali uang harian dalam daerah.
- (7a) Untuk Perjalanan Dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transportasi, dapat diberikan uang harian dalam kota dan uang penginapan.
- (7b) Pemberian uang penginapan pada Perjalanan Dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (7a) dipertanggungjawabkan secara riil dan diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

(8) Besaran ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

- (8) Besaran uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (13) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk:
- a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan; dan
  - b. biaya tol dan/atau retribusi (parkir dan lainnya) yang dipungut di terminal bus/ bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (2) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tiket pesawat/ tiket bus/ tiket kereta api/ transportasi air;
  - b. biaya taksi;
  - c. biaya transpor perjalanan darat; dan
  - d. sewa kendaraan.
- (3) Biaya tiket pesawat/tiket bus/tiket kereta api/ transportasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara/tiket bus/tiket kereta api/ transportasi air pergi pulang (PP) dari bandara/ terminal/ stasiun/ pelabuhan keberangkatan suatu kota ke bandara/terminal/stasiun/pelabuhan kota tujuan.
- (4) Pembiayaan tiket pesawat Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat Perjalanan Dinas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- (5) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk:

a. biaya ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

- a. biaya taksi keberangkatan:
    1. dari kantor Tempat Kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke Tempat Tujuan; dan
    2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju Tempat Tujuan.
  - b. biaya taksi kepulangan:
    1. dari Tempat Tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke Tempat Kedudukan asal; dan
    2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor Tempat Kedudukan asal.
- (6) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
  - (7) Pembiayaan satuan biaya taksi dapat dilaksanakan melebihi standar biaya sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
  - (8) Biaya transpor darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
    - a. biaya transportasi darat luar Daerah; dan
    - b. biaya transportasi darat dalam Daerah.
  - (9) Dalam hal transportasi darat menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan dinas operasional sewa dapat diberikan biaya pengganti bahan bakar minyak dengan besaran senilai biaya Carter (*One Way*) dengan batasan tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (10) Pengganti biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disertai dengan tanda bukti pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) berupa setruk pembelian.

(11) Dalam ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

- (11) Dalam hal Perjalanan Dinas dalam Daerah tidak mendapatkan bukti pembelian yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (10), pelaksana Perjalanan Dinas harus melampirkan surat pernyataan riil.
- (12) Tanggal struk bukti pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sesuai dengan tanggal pelaksanaan Perjalanan Dinas yang tercantum dalam SPT atau 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal SPT Perjalanan Dinas.
- (13) Transpor perjalanan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat menggunakan kendaraan carter dengan ketentuan:
  - a. untuk perjalanan dinas luar daerah, 1 (satu) unit kendaraan carter digunakan minimal untuk 4 (empat) orang pelaksana perjalanan dinas dan dalam 1 unit kendaraan carter memuat maksimal 4 orang;
  - b. untuk perjalanan dinas dalam daerah, 1 (satu) unit kendaraan carter dapat digunakan untuk 1 (satu) orang pelaksana perjalanan dinas; dan
  - c. biaya carter hanya dibebankan kepada 1 (satu) orang untuk 1 (satu) unit kendaraan carter yang merupakan biaya keberangkatan dan kepulangan yang merupakan biaya riil, selebihnya pelaksana perjalanan dinas tidak diberikan biaya transportasi.
- (14) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan hanya untuk mengikuti kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan kegiatan insidental yang digunakan untuk kebutuhan sifatnya tidak terus-menerus.
- (15) Biaya bantuan bahan bakar minyak Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan sewa disesuaikan dengan tanda bukti pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau bukti pembelian yang sah.
- (16) Dalam hal tidak mendapatkan bukti pembelian yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (15), peserta Perjalanan Dinas harus melampirkan surat pernyataan riil.

(17) Dalam ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

- (17) Dalam hal satuan biaya transportasi darat belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar (*at cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) ASN yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Negeri harus membuat laporan Perjalanan Dinas sebagai pendukung pertanggung jawaban sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pimpinan dan anggota DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Negeri membuat laporan sesuai dengan mekanisme pada DPRD.
- (3) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen:
  - a. SPT yang sah dari Pejabat yang Berwenang;
  - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
  - c. bukti tiket, boarding pass pesawat/ kapal air / kereta/ bus, bukti biaya masuk/ retribusi/ parkir/ airport tax bandara udara/pelabuhan/stasiun kereta/terminal bus pergi pulang, dan/atau bukti pembayaran modal transportasi lainnya yang berkaitan dengan biaya transportasi;
  - d. bukti pembayaran uang harian, Uang Representasi dan uang hotel/penginapan 30% (tiga puluh persen) cukup dengan lampiran tanda terima yang mencantumkan seluruh pembiayaan pada rincian biaya Perjalanan Dinas yang diketahui oleh PA/KPA;
  - e. bukti ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

- e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya;
  - f. bukti pembayaran yang sah untuk biaya transportasi maupun carter kendaraan berupa kuitansi maupun tiket yang dibubuhi stempel yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan atau jasa transportasi ataupun bukti pembayaran lainnya;
  - g. pernyataan kebenaran pengeluaran Biaya Riil (bukti pengganti pengeluaran biaya) dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf e tidak diperoleh/ hilang/ rusak / mengalami musibah/ pencurian/kondisi tertentu lainnya sehingga bukti pengeluaran riil sulit diperoleh dan/atau tempat menginap lainnya tidak dapat mengeluarkan kuitansi, maka pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat menggunakan daftar pengeluaran riil dengan menyatakan bahwa daftar pengeluaran dimaksud merupakan pengganti bukti pengeluaran yang hilang/rusak dan/atau yang sulit diperoleh, yang disetujui oleh PA/KPA, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
  - h. laporan hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
5. Ketentuan angka 4 Lampiran I serta huruf b, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h dan huruf i Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 30 Desember 2025  
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd.

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 30 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd.

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,

Ardiansyah, S. H.  
Penata Tingkat I (III/d)  
NIP. 1979111921001 1 008

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 51 TAHUN 2025  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44  
TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

TINGKATAN PENGGOLONGAN PERJALANAN DINAS

| NO  | TINGKAT PENGGOLONGAN PERJALANAN DINAS                                                                                                                                                                   | MODA TRANSPORTASI |              |                    |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|
|     |                                                                                                                                                                                                         | PESAWAT UDARA     | KAPAL LAUT   | KERETA API/BUS     | LAINNYA      |
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                     | (3)               | (4)          | (5)                | (6)          |
| 1   | Tingkat A Pejabat Negara Lainnya untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Ketua /Wakil Ketua DPRD, Pejabat Eselon I, serta Pejabat lainnya yang setara. | BISNIS            | KELAS IA/VIP | SPESIAL/EKSEKUTIVE | Menyesuaikan |
| 2   | Tingkat B untuk Anggota DPRD/Pejabat Eselon II dan Jabatan Fungsional Ahli Madya dan Utama, serta Pejabat lainnya yang setara.                                                                          | EKONOMI           | KELAS IB     | EKSEKUTIVE         | Menyesuaikan |
| 3   | Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Gol IV.                                                                                                                                                          | EKONOMI           | KELAS IIA    | EKSEKUTIVE         | Menyesuaikan |
| 4   | Tingkat D untuk Pejabat Esselon IV/PNS Golongan III, II, I, Jabatan Fungsional Ahli dan Terampil, CPNS, PPPK dan Pegawai Non ASN.                                                                       | EKONOMI           | KELAS IIA    | EKSEKUTIVE         | Menyesuaikan |

BUPATI KUTAI TIMUR,  
  
ttd.

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,



  
Ardiansyah S. H.  
Penata Tingkat I (III/d)  
NIP. 1979111921001 1 008

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 51 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN  
2024 TENTANG PEDOMAN  
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

B. SATUAN BIAYA TAKSI SEKALI JALAN (ONE WAY)

| NO  | PROVINSI            | SATUAN       | BESARAN    |
|-----|---------------------|--------------|------------|
| (1) | (2)                 | (3)          | (4)        |
| 1.  | ACEH                | Orang / Kali | Rp 127.000 |
| 2.  | SUMATERA UTARA      | Orang / Kali | Rp 308.000 |
| 3.  | RIAU                | Orang / Kali | Rp 101.000 |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU      | Orang / Kali | Rp 165.000 |
| 5.  | J A M B I           | Orang / Kali | Rp 147.000 |
| 6.  | SUMATERA BARAT      | Orang / Kali | Rp 190.000 |
| 7.  | SUMATERA SELATAN    | Orang / Kali | Rp 179.000 |
| 8.  | LAMPUNG             | Orang / Kali | Rp 168.000 |
| 9.  | BENGKULU            | Orang / Kali | Rp 109.000 |
| 10. | BANGKA BELITUNG     | Orang / Kali | Rp 97.000  |
| 11. | BANTEN              | Orang / Kali | Rp 536.000 |
| 12. | JAWA BARAT          | Orang / Kali | Rp 200.000 |
| 13. | D.K.I. JAKARTA      | Orang / Kali | Rp 256.000 |
| 14. | JAWA TENGAH         | Orang / Kali | Rp 108.000 |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA     | Orang / Kali | Rp 267.000 |
| 16. | JAWA TIMUR          | Orang / Kali | Rp 233.000 |
| 17. | B A L I             | Orang / Kali | Rp 227.000 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | Orang / Kali | Rp 231.000 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | Orang / Kali | Rp 116.000 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT    | Orang / Kali | Rp 171.000 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH   | Orang / Kali | Rp 134.000 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN  | Orang / Kali | Rp 180.000 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR    | Orang / Kali | Rp 533.000 |
| 24. | KALIMANTAN UTARA    | Orang / Kali | Rp 218.000 |
| 25. | SULAWESI UTARA      | Orang / Kali | Rp 138.000 |
| 26. | GORONTALO           | Orang / Kali | Rp 265.000 |
| 27. | SULAWESI BARAT      | Orang / Kali | Rp 313.000 |
| 28. | SULAWESI SELATAN    | Orang / Kali | Rp 187.000 |
| 29. | SULAWESI TENGAH     | Orang / Kali | Rp 165.000 |
| 30. | SULAWESI TENGGARA   | Orang / Kali | Rp 171.000 |
| 31. | MALUKU              | Orang / Kali | Rp 288.000 |
| 32. | MALUKU UTARA        | Orang / Kali | Rp 215.000 |
| 33. | PAPUA               | Orang / Kali | Rp 513.000 |
| 34. | PAPUA BARAT         | Orang / Kali | Rp 236.000 |
| 35. | PAPUA BARAT DAYA    | Orang / Kali | Rp 236.000 |
| 36. | PAPUA TENGAH        | Orang / Kali | Rp 513.000 |
| 37. | PAPUA SELATAN       | Orang / Kali | Rp 513.000 |
| 38. | PAPUA PEGUNUNGAN    | Orang / Kali | Rp 513.000 |

Keterangan:  
Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun keberangkatan atau dari bandara/ pelabuhan/terminal/ stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/ pelabuhan/terminal/ stasiun kedatangan dan sebaliknya.

D. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

1. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DI LUAR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

| NO. | PROVINSI            | SATUAN | TARIF HOTEL                               |                                |                                |                                                                                         |
|-----|---------------------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                     |        | KEPALA DAERAH/KETUA DPRD/PEJABAT ESELON I | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV | PEJABAT ESELON IV/PNS GOLONGAN III, II, I, FUNGSIONAL AHLI DAN TERAMPIL, CPNS, PPPK DAN |
|     |                     |        | TINGKAT. A                                | TINGKAT. B                     | TINGKAT. C                     | TINGKAT. D                                                                              |
| (1) | (2)                 | (3)    | (4)                                       | (5)                            | (6)                            | (7)                                                                                     |
| 1.  | ACEH                | OH     | Rp 4.420.000                              | Rp 3.526.000                   | Rp 1.533.000                   | Rp 770.000                                                                              |
| 2.  | SUMATERA UTARA      | OH     | Rp 4.960.000                              | Rp 2.195.000                   | Rp 1.100.000                   | Rp 699.000                                                                              |
| 3.  | RIAU                | OH     | Rp 3.820.000                              | Rp 3.119.000                   | Rp 1.650.000                   | Rp 852.000                                                                              |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU      | OH     | Rp 5.344.000                              | Rp 2.318.000                   | Rp 1.297.000                   | Rp 792.000                                                                              |
| 5.  | J A M B I           | OH     | Rp 5.000.000                              | Rp 4.102.000                   | Rp 1.225.000                   | Rp 580.000                                                                              |
| 6.  | SUMATERA BARAT      | OH     | Rp 5.236.000                              | Rp 3.332.000                   | Rp 1.353.000                   | Rp 701.000                                                                              |
| 7.  | SUMATERA SELATAN    | OH     | Rp 5.850.000                              | Rp 3.083.000                   | Rp 1.955.000                   | Rp 861.000                                                                              |
| 8.  | LAMPUNG             | OH     | Rp 4.491.000                              | Rp 2.488.000                   | Rp 1.425.000                   | Rp 580.000                                                                              |
| 9.  | BENGKULU            | OH     | Rp 2.140.000                              | Rp 1.628.000                   | Rp 1.546.000                   | Rp 692.000                                                                              |
| 10. | BANGKA BELITUNG     | OH     | Rp 3.827.000                              | Rp 2.838.000                   | Rp 1.957.000                   | Rp 649.000                                                                              |
| 11. | BANTEN              | OH     | Rp 5.725.000                              | Rp 2.373.000                   | Rp 1.204.000                   | Rp 724.000                                                                              |
| 12. | JAWA BARAT          | OH     | Rp 5.381.000                              | Rp 2.755.000                   | Rp 1.201.000                   | Rp 686.000                                                                              |
| 13. | D.K.I. JAKARTA      | OH     | Rp 8.720.000                              | Rp 2.063.000                   | Rp 992.000                     | Rp 730.000                                                                              |
| 14. | JAWA TENGAH         | OH     | Rp 5.303.000                              | Rp 1.850.000                   | Rp 1.201.000                   | Rp 750.000                                                                              |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA     | OH     | Rp 5.017.000                              | Rp 2.695.000                   | Rp 1.384.000                   | Rp 845.000                                                                              |
| 16. | JAWA TIMUR          | OH     | Rp 4.449.000                              | Rp 2.007.000                   | Rp 1.153.000                   | Rp 814.000                                                                              |
| 17. | B A L I             | OH     | Rp 6.848.000                              | Rp 2.433.000                   | Rp 1.685.000                   | Rp 1.138.000                                                                            |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | OH     | Rp 4.375.000                              | Rp 2.648.000                   | Rp 1.418.000                   | Rp 907.000                                                                              |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | OH     | Rp 3.750.000                              | Rp 2.133.000                   | Rp 1.355.000                   | Rp 688.000                                                                              |
| 20. | KALIMANTAN BARAT    | OH     | Rp 2.654.000                              | Rp 1.923.000                   | Rp 1.125.000                   | Rp 538.000                                                                              |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH   | OH     | Rp 4.901.000                              | Rp 3.391.000                   | Rp 1.160.000                   | Rp 659.000                                                                              |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN  | OH     | Rp 4.797.000                              | Rp 3.316.000                   | Rp 1.500.000                   | Rp 697.000                                                                              |
| 23. | KALIMANTAN UTARA    | OH     | Rp 4.000.000                              | Rp 2.735.000                   | Rp 1.507.000                   | Rp 904.000                                                                              |
| 24. | SULAWESI UTARA      | OH     | Rp 4.919.000                              | Rp 2.290.000                   | Rp 1.207.000                   | Rp 978.000                                                                              |
| 25. | GORONTALO           | OH     | Rp 4.168.000                              | Rp 3.107.000                   | Rp 1.606.000                   | Rp 955.000                                                                              |
| 26. | SULAWESI BARAT      | OH     | Rp 4.076.000                              | Rp 3.098.000                   | Rp 1.344.000                   | Rp 704.000                                                                              |
| 27. | SULAWESI SELATAN    | OH     | Rp 4.820.000                              | Rp 1.938.000                   | Rp 1.423.000                   | Rp 745.000                                                                              |
| 28. | SULAWESI TENGAH     | OH     | Rp 2.309.000                              | Rp 2.027.000                   | Rp 1.679.000                   | Rp 951.000                                                                              |
| 29. | SULAWESI TENGGARA   | OH     | Rp 3.088.800                              | Rp 2.574.000                   | Rp 1.297.000                   | Rp 786.000                                                                              |
| 30. | MALUKU              | OH     | Rp 3.467.000                              | Rp 3.240.000                   | Rp 1.059.000                   | Rp 667.000                                                                              |
| 31. | MALUKU UTARA        | OH     | Rp 4.611.600                              | Rp 3.843.000                   | Rp 1.160.000                   | Rp 605.000                                                                              |
| 32. | PAPUA               | OH     | Rp 3.859.000                              | Rp 3.318.000                   | Rp 2.521.000                   | Rp 1.038.000                                                                            |
| 33. | PAPUA BARAT         | OH     | Rp 3.872.000                              | Rp 3.341.000                   | Rp 2.056.000                   | Rp 967.000                                                                              |
| 34. | PAPUA BARAT DAYA    | OH     | Rp 3.872.000                              | Rp 3.341.000                   | Rp 2.056.000                   | Rp 967.000                                                                              |
| 35. | PAPUA TENGAH        | OH     | Rp 3.859.000                              | Rp 3.318.000                   | Rp 2.521.000                   | Rp 1.038.000                                                                            |
| 36. | PAPUA SELATAN       | OH     | Rp 5.673.000                              | Rp 4.877.000                   | Rp 3.706.000                   | Rp 1.526.000                                                                            |
| 37. | PAPUA PEGUNUNGAN    | OH     | Rp 5.711.000                              | Rp 4.911.000                   | Rp 3.731.000                   | Rp 1.536.000                                                                            |

2. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DI DALAM WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

| NO. | PROVINSI         | SATUAN | TARIF HOTEL                               |                                |                                |                                                                                                         |
|-----|------------------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |        | KEPALA DAERAH/KETUA DPRD/PEJABAT ESELON I | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV | PEJABAT ESELON IV/PNS GOLONGAN III, II, I, FUNGSIONAL AHLI DAN TERAMPIL, CPNS, PPPK DAN PEGAWAI NON ASN |
|     |                  |        | TINGKAT. A                                | TINGKAT. B                     | TINGKAT. C                     | TINGKAT. D                                                                                              |
| 1.  | KALIMANTAN TIMUR | OH     | 4.000.000                                 | 2.188.000                      | 1.507.000                      | 804.000                                                                                                 |

E. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

1. UANG HARIAN DI LUAR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

| NO. | PROVINSI            | SATUAN | BESARAN    | DIKLAT     |
|-----|---------------------|--------|------------|------------|
| (1) | (2)                 | (3)    | (4)        | (5)        |
| 1.  | ACEH                | OH     | Rp 360.000 | Rp 110.000 |
| 2.  | SUMATERA UTARA      | OH     | Rp 370.000 | Rp 110.000 |
| 3.  | RIAU                | OH     | Rp 370.000 | Rp 110.000 |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU      | OH     | Rp 370.000 | Rp 110.000 |
| 5.  | J A M B I           | OH     | Rp 370.000 | Rp 110.000 |
| 6.  | SUMATERA BARAT      | OH     | Rp 380.000 | Rp 110.000 |
| 7.  | SUMATERA SELATAN    | OH     | Rp 380.000 | Rp 110.000 |
| 8.  | LAMPUNG             | OH     | Rp 380.000 | Rp 110.000 |
| 9.  | BENGKULU            | OH     | Rp 380.000 | Rp 110.000 |
| 10. | BANGKA BELITUNG     | OH     | Rp 410.000 | Rp 120.000 |
| 11. | BANTEN              | OH     | Rp 370.000 | Rp 110.000 |
| 12. | JAWA BARAT          | OH     | Rp 430.000 | Rp 130.000 |
| 13. | D.K.I. JAKARTA      | OH     | Rp 530.000 | Rp 160.000 |
| 14. | JAWA TENGAH         | OH     | Rp 370.000 | Rp 110.000 |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA     | OH     | Rp 420.000 | Rp 130.000 |
| 16. | JAWA TIMUR          | OH     | Rp 410.000 | Rp 120.000 |
| 17. | B A L I             | OH     | Rp 480.000 | Rp 140.000 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | OH     | Rp 440.000 | Rp 130.000 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | OH     | Rp 430.000 | Rp 130.000 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT    | OH     | Rp 380.000 | Rp 110.000 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH   | OH     | Rp 360.000 | Rp 110.000 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN  | OH     | Rp 380.000 | Rp 110.000 |
| 23. | KALIMANTAN UTARA    | OH     | Rp 430.000 | Rp 130.000 |
| 24. | SULAWESI UTARA      | OH     | Rp 370.000 | Rp 110.000 |
| 25. | GORONTALO           | OH     | Rp 370.000 | Rp 110.000 |
| 26. | SULAWESI BARAT      | OH     | Rp 410.000 | Rp 120.000 |
| 27. | SULAWESI SELATAN    | OH     | Rp 430.000 | Rp 130.000 |
| 28. | SULAWESI TENGAH     | OH     | Rp 370.000 | Rp 110.000 |
| 29. | SULAWESI TENGGARA   | OH     | Rp 380.000 | Rp 110.000 |
| 30. | MALUKU              | OH     | Rp 380.000 | Rp 110.000 |
| 31. | MALUKU UTARA        | OH     | Rp 430.000 | Rp 130.000 |
| 32. | PAPUA               | OH     | Rp 580.000 | Rp 170.000 |
| 33. | PAPUA BARAT         | OH     | Rp 480.000 | Rp 140.000 |
| 34. | PAPUA BARAT DAYA    | OH     | Rp 480.000 | Rp 140.000 |
| 35. | PAPUA TENGAH        | OH     | Rp 580.000 | Rp 170.000 |
| 36. | PAPUA SELATAN       | OH     | Rp 580.000 | Rp 170.000 |
| 37. | PAPUA PEGUNUNGAN    | OH     | Rp 580.000 | Rp 170.000 |

2. UANG HARIAN LUAR KOTA DI DALAM WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

| NO. | PROVINSI         | SATUAN | BESARAN    | DIKLAT     |
|-----|------------------|--------|------------|------------|
| 1.  | KALIMANTAN TIMUR | OH     | Rp 430.000 | Rp 130.000 |

**F. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA**

| NO. | URAIAN                         | SATUAN | LUAR KOTA  |
|-----|--------------------------------|--------|------------|
| (1) | (2)                            | (3)    | (4)        |
| 1.  | PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH | OH     | Rp 250.000 |
| 2.  | PEJABAT ESELON I               | OH     | Rp 200.000 |
| 3.  | PEJABAT ESELON II              | OH     | Rp 150.000 |

G. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR  
SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

| NO. | PROVINSI            | SATUAN | HALFDAY    | FULLDAY      | FULLBOARD    | RESIDENCE    |
|-----|---------------------|--------|------------|--------------|--------------|--------------|
| (1) | (2)                 | (3)    | (4)        | (5)          | (6)          | (7)          |
| 1.  | ACEH                | OP     | Rp 453.000 | Rp 663.000   | Rp 1.732.000 | Rp 1.116.000 |
| 2.  | SUMATERA UTARA      | OP     | Rp 451.000 | Rp 675.000   | Rp 1.350.000 | Rp 1.126.000 |
| 3.  | RIAU                | OP     | Rp 319.000 | Rp 582.000   | Rp 1.229.000 | Rp 901.000   |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU      | OP     | Rp 471.000 | Rp 634.000   | Rp 1.484.000 | Rp 1.105.000 |
| 5.  | J A M B I           | OP     | Rp 465.000 | Rp 595.000   | Rp 1.538.000 | Rp 1.060.000 |
| 6.  | SUMATERA BARAT      | OP     | Rp 351.000 | Rp 502.000   | Rp 1.492.000 | Rp 853.000   |
| 7.  | SUMATERA SELATAN    | OP     | Rp 489.000 | Rp 718.000   | Rp 1.448.000 | Rp 1.207.000 |
| 8.  | LAMPUNG             | OP     | Rp 452.000 | Rp 577.000   | Rp 1.200.000 | Rp 1.029.000 |
| 9.  | BENGKULU            | OP     | Rp 383.000 | Rp 538.000   | Rp 1.262.000 | Rp 921.000   |
| 10. | BANGKA BELITUNG     | OP     | Rp 555.000 | Rp 714.000   | Rp 1.632.000 | Rp 1.269.000 |
| 11. | BANTEN              | OP     | Rp 678.000 | Rp 930.000   | Rp 1.752.000 | Rp 1.608.000 |
| 12. | JAWA BARAT          | OP     | Rp 567.000 | Rp 799.000   | Rp 1.914.000 | Rp 1.366.000 |
| 13. | D.K.I. JAKARTA      | OP     | Rp 760.000 | Rp 993.000   | Rp 2.257.000 | Rp 1.753.000 |
| 14. | JAWA TENGAH         | OP     | Rp 426.000 | Rp 738.000   | Rp 1.576.000 | Rp 1.164.000 |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA     | OP     | Rp 458.000 | Rp 607.000   | Rp 1.470.000 | Rp 1.065.000 |
| 16. | JAWA TIMUR          | OP     | Rp 442.000 | Rp 710.000   | Rp 2.159.000 | Rp 1.152.000 |
| 17. | B A L I             | OP     | Rp 737.000 | Rp 907.000   | Rp 2.523.000 | Rp 1.644.000 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | OP     | Rp 503.000 | Rp 800.000   | Rp 1.413.000 | Rp 1.303.000 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | OP     | Rp 642.000 | Rp 1.046.000 | Rp 2.013.000 | Rp 1.688.000 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT    | OP     | Rp 462.000 | Rp 617.000   | Rp 1.247.000 | Rp 1.079.000 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH   | OP     | Rp 455.000 | Rp 679.000   | Rp 2.092.000 | Rp 1.134.000 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN  | OP     | Rp 380.000 | Rp 545.000   | Rp 1.340.900 | Rp 925.000   |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR    | OP     | Rp 423.000 | Rp 750.000   | Rp 1.250.000 | Rp 1.173.000 |
| 24. | KALIMANTAN UTARA    | OP     | Rp 393.000 | Rp 722.700   | Rp 1.763.300 | Rp 1.115.700 |
| 25. | SULAWESI UTARA      | OP     | Rp 490.000 | Rp 620.000   | Rp 1.250.000 | Rp 1.110.000 |
| 26. | GORONTALO           | OP     | Rp 390.000 | Rp 562.000   | Rp 2.296.800 | Rp 952.000   |
| 27. | SULAWESI BARAT      | OP     | Rp 390.000 | Rp 574.000   | Rp 1.301.000 | Rp 964.000   |
| 28. | SULAWESI SELATAN    | OP     | Rp 403.000 | Rp 583.000   | Rp 2.218.000 | Rp 986.000   |
| 29. | SULAWESI TENGAH     | OP     | Rp 440.000 | Rp 652.000   | Rp 1.672.000 | Rp 1.092.000 |
| 30. | SULAWESI TENGGARA   | OP     | Rp 510.000 | Rp 552.000   | Rp 1.335.000 | Rp 949.000   |
| 31. | MALUKU              | OP     | Rp 463.000 | Rp 638.000   | Rp 1.881.000 | Rp 1.101.000 |
| 32. | MALUKU UTARA        | OP     | Rp 575.000 | Rp 693.000   | Rp 1.220.000 | Rp 1.268.000 |
| 33. | PAPUA               | OP     | Rp 482.000 | Rp 768.000   | Rp 2.063.000 | Rp 1.250.000 |
| 34. | PAPUA BARAT         | OP     | Rp 503.000 | Rp 728.000   | Rp 1.952.000 | Rp 1.231.000 |
| 35. | PAPUA BARAT DAYA    | OP     | Rp 503.000 | Rp 728.000   | Rp 1.952.000 | Rp 1.231.000 |
| 36. | PAPUA TENGAH        | OP     | Rp 482.000 | Rp 768.000   | Rp 2.063.000 | Rp 1.250.000 |
| 37. | PAPUA SELATAN       | OP     | Rp 709.000 | Rp 1.129.000 | Rp 3.033.000 | Rp 1.838.000 |
| 38. | PAPUA PEGUNUNGAN    | OP     | Rp 739.000 | Rp 1.070.000 | Rp 2.869.000 | Rp 1.809.000 |

Keterangan:

1. Satuan biaya paket kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.
2. Untuk pejabat eselon II ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
3. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan satuan biaya ini.

H. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR  
SETINGKAT ESELON II

| NO. | PROVINSI            | SATUAN | HALFDAY      | FULLDAY      | FULLBOARD    | RESIDENCE    |
|-----|---------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (1) | (2)                 | (3)    | (4)          | (5)          | (6)          | (7)          |
| 1.  | ACEH                | OP     | Rp 413.000   | Rp 575.000   | Rp 1.075.000 | Rp 988.000   |
| 2.  | SUMATERA UTARA      | OP     | Rp 411.000   | Rp 511.000   | Rp 1.011.000 | Rp 922.000   |
| 3.  | RIAU                | OP     | Rp 279.000   | Rp 432.000   | Rp 1.084.000 | Rp 711.000   |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU      | OP     | Rp 431.000   | Rp 531.000   | Rp 1.170.000 | Rp 962.000   |
| 5.  | J A M B I           | OP     | Rp 425.000   | Rp 525.000   | Rp 1.298.000 | Rp 950.000   |
| 6.  | SUMATERA BARAT      | OP     | Rp 311.000   | Rp 432.000   | Rp 987.000   | Rp 743.000   |
| 7.  | SUMATERA SELATAN    | OP     | Rp 391.000   | Rp 502.000   | Rp 1.030.000 | Rp 893.000   |
| 8.  | LAMPUNG             | OP     | Rp 421.000   | Rp 512.000   | Rp 950.000   | Rp 933.000   |
| 9.  | BENGKULU            | OP     | Rp 343.000   | Rp 468.000   | Rp 1.062.000 | Rp 811.000   |
| 10. | BANGKA BELITUNG     | OP     | Rp 449.000   | Rp 582.000   | Rp 1.115.000 | Rp 1.031.000 |
| 11. | BANTEN              | OP     | Rp 502.000   | Rp 632.000   | Rp 1.201.000 | Rp 1.134.000 |
| 12. | JAWA BARAT          | OP     | Rp 474.000   | Rp 692.000   | Rp 1.110.000 | Rp 1.166.000 |
| 13. | D.K.I. JAKARTA      | OP     | Rp 542.000   | Rp 667.000   | Rp 1.347.000 | Rp 1.209.000 |
| 14. | JAWA TENGAH         | OP     | Rp 3.030.000 | Rp 474.000   | Rp 919.000   | Rp 777.000   |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA     | OP     | Rp 332.000   | Rp 507.000   | Rp 1.204.000 | Rp 839.000   |
| 16. | JAWA TIMUR          | OP     | Rp 398.000   | Rp 623.000   | Rp 1.784.000 | Rp 1.021.000 |
| 17. | B A L I             | OP     | Rp 488.000   | Rp 652.000   | Rp 1.569.000 | Rp 1.140.000 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | OP     | Rp 488.000   | Rp 713.000   | Rp 1.213.000 | Rp 1.201.000 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | OP     | Rp 463.000   | Rp 602.000   | Rp 1.294.000 | Rp 1.065.000 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT    | OP     | Rp 422.000   | Rp 547.000   | Rp 1.047.000 | Rp 969.000   |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH   | OP     | Rp 415.000   | Rp 609.000   | Rp 1.902.000 | Rp 1.024.000 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN  | OP     | Rp 340.000   | Rp 457.000   | Rp 1.219.000 | Rp 815.000   |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR    | OP     | Rp 324.000   | Rp 478.000   | Rp 1.050.000 | Rp 802.000   |
| 24. | KALIMANTAN UTARA    | OP     | Rp 373.000   | Rp 657.000   | Rp 1.603.000 | Rp 1.030.000 |
| 25. | SULAWESI UTARA      | OP     | Rp 450.000   | Rp 550.000   | Rp 1.050.000 | Rp 1.000.000 |
| 26. | GORONTALO           | OP     | Rp 350.000   | Rp 492.000   | Rp 2.088.000 | Rp 842.000   |
| 27. | SULAWESI BARAT      | OP     | Rp 350.000   | Rp 504.000   | Rp 1.101.000 | Rp 854.000   |
| 28. | SULAWESI SELATAN    | OP     | Rp 363.000   | Rp 513.000   | Rp 1.574.000 | Rp 876.000   |
| 29. | SULAWESI TENGAH     | OP     | Rp 400.000   | Rp 582.000   | Rp 1.520.000 | Rp 982.000   |
| 30. | SULAWESI TENGGARA   | OP     | Rp 464.000   | Rp 604.000   | Rp 1.171.000 | Rp 1.068.000 |
| 31. | MALUKU              | OP     | Rp 423.000   | Rp 568.000   | Rp 1.710.000 | Rp 991.000   |
| 32. | MALUKU UTARA        | OP     | Rp 523.000   | Rp 623.000   | Rp 1.050.000 | Rp 1.146.000 |
| 33. | PAPUA               | OP     | Rp 442.000   | Rp 698.000   | Rp 1.863.000 | Rp 1.140.000 |
| 34. | PAPUA BARAT         | OP     | Rp 463.000   | Rp 658.000   | Rp 1.752.000 | Rp 1.121.000 |
| 35. | PAPUA BARAT DAYA    | OP     | Rp 463.000   | Rp 658.000   | Rp 1.752.000 | Rp 1.121.000 |
| 36. | PAPUA TENGAH        | OP     | Rp 442.000   | Rp 698.000   | Rp 1.863.000 | Rp 1.140.000 |
| 37. | PAPUA SELATAN       | OP     | Rp 650.000   | Rp 1.026.000 | Rp 2.739.000 | Rp 1.676.000 |
| 38. | PAPUA PEGUNUNGAN    | OP     | Rp 650.000   | Rp 1.026.000 | Rp 2.739.000 | Rp 1.676.000 |

Keterangan:

1. Satuan biaya paket kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.
2. Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
3. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan satuan biaya ini.

**I. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR**

| NO. | PROVINSI            | SATUAN | FULLBOARD  | FULLDAY/<br>HALFDAY DI<br>DALAM KOTA | RESIDENCE DI<br>DALAM KOTA |
|-----|---------------------|--------|------------|--------------------------------------|----------------------------|
| (1) | (2)                 | (3)    | (4)        | (6)                                  | (7)                        |
| 1.  | ACEH                | OH     | Rp 120.000 | Rp 85.000                            | Rp 120.000                 |
| 2.  | SUMATERA UTARA      | OH     | Rp 130.000 | Rp 95.000                            | Rp 130.000                 |
| 3.  | RIAU                | OH     | Rp 130.000 | Rp 85.000                            | Rp 130.000                 |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU      | OH     | Rp 130.000 | Rp 95.000                            | Rp 130.000                 |
| 5.  | J A M B I           | OH     | Rp 130.000 | Rp 95.000                            | Rp 130.000                 |
| 6.  | SUMATERA BARAT      | OH     | Rp 120.000 | Rp 85.000                            | Rp 120.000                 |
| 7.  | SUMATERA SELATAN    | OH     | Rp 120.000 | Rp 85.000                            | Rp 120.000                 |
| 8.  | LAMPUNG             | OH     | Rp 130.000 | Rp 95.000                            | Rp 130.000                 |
| 9.  | BENGKULU            | OH     | Rp 130.000 | Rp 95.000                            | Rp 130.000                 |
| 10. | BANGKA BELITUNG     | OH     | Rp 130.000 | Rp 95.000                            | Rp 130.000                 |
| 11. | BANTEN              | OH     | Rp 120.000 | Rp 85.000                            | Rp 120.000                 |
| 12. | JAWA BARAT          | OH     | Rp 150.000 | Rp 105.000                           | Rp 150.000                 |
| 13. | D.K.I. JAKARTA      | OH     | Rp 180.000 | Rp 130.000                           | Rp 180.000                 |
| 14. | JAWA TENGAH         | OH     | Rp 130.000 | Rp 95.000                            | Rp 130.000                 |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA     | OH     | Rp 140.000 | Rp 100.000                           | Rp 140.000                 |
| 16. | JAWA TIMUR          | OH     | Rp 140.000 | Rp 100.000                           | Rp 140.000                 |
| 17. | B A L I             | OH     | Rp 160.000 | Rp 115.000                           | Rp 160.000                 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | OH     | Rp 150.000 | Rp 105.000                           | Rp 150.000                 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | OH     | Rp 140.000 | Rp 100.000                           | Rp 140.000                 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT    | OH     | Rp 130.000 | Rp 95.000                            | Rp 130.000                 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH   | OH     | Rp 120.000 | Rp 85.000                            | Rp 120.000                 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN  | OH     | Rp 130.000 | Rp 95.000                            | Rp 130.000                 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR    | OH     | Rp 150.000 | Rp 105.000                           | Rp 150.000                 |
| 24. | KALIMANTAN UTARA    | OH     | Rp 150.000 | Rp 105.000                           | Rp 150.000                 |
| 25. | SULAWESI UTARA      | OH     | Rp 130.000 | Rp 95.000                            | Rp 130.000                 |
| 26. | GORONTALO           | OH     | Rp 130.000 | Rp 95.000                            | Rp 130.000                 |
| 27. | SULAWESI BARAT      | OH     | Rp 120.000 | Rp 85.000                            | Rp 120.000                 |
| 28. | SULAWESI SELATAN    | OH     | Rp 150.000 | Rp 105.000                           | Rp 150.000                 |
| 29. | SULAWESI TENGAH     | OH     | Rp 130.000 | Rp 95.000                            | Rp 130.000                 |
| 30. | SULAWESI TENGGARA   | OH     | Rp 130.000 | Rp 95.000                            | Rp 130.000                 |
| 31. | MALUKU              | OH     | Rp 120.000 | Rp 85.000                            | Rp 120.000                 |
| 32. | MALUKU UTARA        | OH     | Rp 130.000 | Rp 95.000                            | Rp 130.000                 |
| 33. | PAPUA               | OH     | Rp 200.000 | Rp 140.000                           | Rp 200.000                 |
| 34. | PAPUA BARAT         | OH     | Rp 160.000 | Rp 115.000                           | Rp 160.000                 |
| 35. | PAPUA BARAT DAYA    | OH     | Rp 160.000 | Rp 115.000                           | Rp 160.000                 |
| 36. | PAPUA TENGAH        | OH     | Rp 200.000 | Rp 140.000                           | Rp 200.000                 |
| 37. | PAPUA SELATAN       | OH     | Rp 200.000 | Rp 140.000                           | Rp 200.000                 |
| 38. | PAPUA PEGUNUNGAN    | OH     | Rp 200.000 | Rp 140.000                           | Rp 200.000                 |

**Keterangan:**

1. Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan fullboard di luar kota, kegiatan fullboard di dalam kota dan kegiatan fullday / half day di luar kota/ di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor.
2. Untuk Pihak lain yang mengikuti kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor diberikan Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor dari keberangkatan sampai dengan kepulangan.

M. **BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)**

| NO | DARI    | TUJUAN                 | SATUAN     | BESARAN      |
|----|---------|------------------------|------------|--------------|
| 1  | Jakarta | Kota Bogor             | Orang/Kali | Rp 300.000   |
| 2  | Jakarta | Kab. Bogor             | Orang/Kali | Rp 300.000   |
| 3  | Jakarta | Kota Bekasi            | Orang/Kali | Rp 284.000   |
| 4  | Jakarta | Kab. Bekasi            | Orang/Kali | Rp 284.000   |
| 5  | Jakarta | Kepulauan Seribu       | Orang/Kali | Rp 428.000   |
| 6  | Jakarta | Kota Tangerang         | Orang/Kali | Rp 286.000   |
| 7  | Jakarta | Kab. Tangerang         | Orang/Kali | Rp 310.000   |
| 8  | Jakarta | Kota Tangerang Selatan | Orang/Kali | Rp 286.000   |
| 9  | Jakarta | Kota Depok             | Orang/Kali | Rp 275.000   |
| 10 | Jakarta | Bandung (Reguler)      | Orang/Kali | Rp 500.000   |
| 11 | Jakarta | Bandung (Carter)       | Orang/Kali | Rp 1.000.000 |

BUPATI KUTAI TIMUR,  
  
ttd.

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,  
  
Ardiansyah, S. H.  
Penata Tingkat I (III/d)  
NIP. 1979111921001 1 008